

Wagub Uu tak Masalah Duet dengan Desy Ratnasari di Pilgub Jabar 2024

BANDUNG (IM)- Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengaku siap maju di Pilgub Jabar 2024. Uu saat ini mengaku fokus mempersiapkan diri agar bisa dilirik atau diusung oleh sejumlah parpol.

PPP sendiri mengaku telah siap mengusung Uu sebagai kandidat di Pilgub Jabar. Beredar isu tentang pasangan yang pas untuk mendampingi Uu, yakni Desy Ratnasari, politikus perempuan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PAN Jabar.

Uu pun tak menampik. Ia mengaku siap jika dipasangkan dengan Desy Ratnasari. PPP dan PAN sendiri di tingkat nasional telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu, partai lainnya yang bergabung adalah Golkar. "Saya dengan sapa pun mangga, dengan Desy pun saya siap," kata Uu di Gedung Sate kepada awak media, Senin (8/8).

Kendati demikian, Uu sadar bahwa keputusan untuk bisa maju di Pilgub Jabar itu tergantung dengan keputusan parpol. Ia mengatakan keinginannya untuk maju di Pilgub Jabar tentu tak bisa tercapai, ketika parpol enggan mengusungnya.

"Kalau partai tidak me-

ngusung ya apa boleh buat," ucap Uu.

Uu menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk maju di Pilgub Jabar kepada partai. Termasuk soal pasangan calon.

"Jadi, kalau saya disandingkan dengan Desy pun siap. Ataupun siap pun saya siap," ucap mantan Bupati Tasikmalaya itu.

Lebih lanjut, Uu mengaku saat ini tengah fokus bekerja. Uu sadar untuk maju di Pilgub Jabar tak mudah. Ia pun harus mematangkan dirinya agar bisa dilirik parpol.

"Saya sekarang ikhtiar saja untuk melayakkan diri, kalau layak tidak hanya PPP nanti yang tertarik," ucap Uu.

Sebelumnya, Uu didorong maju dalam Pilgub Jabar 2024. Uu dinilai sudah saatnya memimpin Jabar. Dorongan itu muncul dari Ketua Umum PPP, Suharsno Monoarfa. Dia menilai sebagai kader, Uu dinilai cocok menjadi Gubernur Jabar. "Kalau bisa Pak Uu jadi gubernur ya, boleh nggak pak Uu jadi gubernur? Kita masa wakil gubernur terus, PPP sudah dua kali loh wakil gubernur, iya kan?," ucap Suharsno kepada wartawan, Jumat (15/7) lalu. ● **pra**

Ridwan Kamil Minta Wali Kota

Sediakan Ruang Publik untuk Pemuda

PADANG (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta kepada wali kota agar menyediakan ruang-ruang publik bagi anak-anak muda untuk berkreasi dan berekspresi. Permintaan Gubernur Ridwan Kamil tersebut disampaikan saat menjadi pembicara Talkshow Youth City Changers (YCC) di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kota Padang.

"Sebagai mantan wali kota, (saya) melihat anak-anak muda yang bermasyarakat itu bibit-bibit masa depan, yang seringkali kotanya kita pahami tidak menyediakan ruang-ruang aspirasi sehingga direbut cita-citanya," kata Ridwan Kamil dalam keterangan persnya, Senin (8/8).

YCC merupakan salah satu kegiatan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2022.

Ridwan Kamil menuturkannya bahwa pemuda yang aktif dalam komunitas berpotensi memiliki

masa depan yang cerah. Hal itu karena mereka mempunyai ruang untuk berkreasi sekaligus mengekspresikan diri. "Sekali lagi, pesan saya kepada seluruh wali kota, sediakanlah ruang-ruang publik yang baik, biarkan anak muda berkreasi, berekspresi. Kemudian, bikin gedung-gedung kreatif supaya dari ekspresi jadi ekonomi. Kalau mereka bisa sejahtera dari ekonominya, kota-kota itu akan luar biasa," katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang hadir dalam YCC mengatakan bahwa generasi muda harus produktif dan memiliki "road map" untuk masa depan yang cerah. "Saatnya kita Indonesia dengan generasi mudanya yang punya keterampilan, 'knowledge', kreatif yang luar biasa, tidak hanya berpikir untuk dalam negeri, tetapi saatnya sekarang kita menyerbu global internasional," kata Zulkifli. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

KELANGKAAN PERTALITE DAN PERTAMAX DI BOGOR

Pengendara motor berputar arah setelah mengetahui BBM jenis Pertalite dan Pertamina kosong di SPBU 34-16117, Kelurahan Pasir Mulya, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (8/8). Sejumlah SPBU di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Pertamina sejak tiga hari terakhir akibat belum datangnya pasokan BBM dari Pertamina.

GENJOT ANGKA VAKSINASI BOOSTER

Pemkot Bogor Aktifkan Kembali Tim Vaksinasi Kewilayahan

Untuk mendongkrak vaksinasi booster, pihaknya mulai bulan Agustus 2022 menggalakkan kembali cabang vaksin di wilayah.

"Memang sedikit agak kesulitan, karena semangat masyarakat untuk vaksin ketiga rendah. Kami butuh partisipasi masyarakat agar mengajak masyarakat lain," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.

BOGOR (IM)- Pemkot Bogor kembali mengaktifkan tim vaksinasi di wilayah agar bisa mendongkrak angka vaksinasi booster.

Selain itu Pemkot Bogor juga telah menyiapkan vaksinasi booster kedua atau vaksin keempat. Namun semua itu, dibutuhkan juga peran serta

atau partisipasi masyarakat agar mengajak sesama untuk melakukan vaksinasi booster kesatu dan kedua.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, untuk mendongkrak vaksinasi booster, pihaknya mulai bulan Agustus 2022 menggalakkan kembali cabang vaksin di

wilayah.

"Namun memang kami agak kesulitan kelihatan, karena semangat masyarakat untuk vaksin ketiga ini rendah," ungkap Dedie, Senin (8/8).

Dedie melanjutkan, dengan diberlakukannya kembali vaksin keempat pihaknya akan mengkombinasikan, sehingga mereka yang sudah vaksin keempat diharapkan mengajak masyarakat yang belum vaksin ketiga.

"Kami butuh partisipasi masyarakat agar mengajak masyarakat lain. Agar lebih masif mendongkrak angka vaksin ketiga yang masih rendah. Kami akan aktivasi juga tim aparat wilayah, makanya puskesmas juga aktif mendata," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno memaparkan, pihaknya tengah

melakukan pendataan terbaru terhadap 12 ribu tenaga kesehatan (nakes) di Kota Bogor dalam pemberian vaksinasi booster kedua.

"Sebagian nakes sudah menerima vaksin booster kedua, untuk pelaksanaannya di fasilitas kesehatan (faskes) para nakes itu bertugas. Vaksinasi booster kedua untuk nakes di Kota Bogor dilaksanakan sesuai Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan RI," ungkap Retno.

Retno melanjutkan, Dinkes juga melakukan pendataan ulang untuk melihat jeda waktu vaksinasi.

"Ada jeda waktu penyuntikan dengan interval enam bulan sejak vaksinasi booster pertama," tambah Retno.

Retno menjelaskan, jumlah nakes di Kota Bogor sekitar 12 ribu orang. Nakes bisa mendapatkan vaksinasi boost-

er di tempat tugas. Jadi jika di faskes tersebut tersedia vaksin silakan sambil simultan, karena mereka bisa membagi dan tidak diberikan sekaligus saat itu atau dilakukan secara bertahap.

"Ya, untuk ketersediaan vaksin yang dimiliki Dinkes Kota Bogor masih aman, jenisnya yakni Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna. Pihaknya juga terus konsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kemenkes untuk ketersediaan vaksin, saat ini di Kota Bogor masih cukup," jelasnya.

"Untuk ketersediaan dosis vaksin booster kami memiliki 40

ribu yang diperuntukkan kepada masyarakat dan booster kedua nakes. Kami juga bisa sewaktu-waktu ke Provinsi Jawa Barat jika stok vaksin habis. Insya Allah ketersediaan vaksin booster kedua untuk nakes aman," pungkasnya. ● **gio**

Pembangunan Tembok Antilongsor Cilebut Bogor Sudah Capai 60%

BOGOR (IM)- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jl Raya Cilebut yang rawan longsor masih terus dikerjakan. Proses pengerjaan sudah mencapai lebih dari setengah tebing.

Progres pengerjaan tembok antilongsor di Jl Raya Cilebut, Kelurahan Sukaresmi, Kota Bogor, disampaikan oleh pengawas proyek pembangunan TPT, M Adiat.

Dia mengatakan, progres proyek saat ini mencapai 60%. Pengerjaan akan dilakukan dengan tambahan jam kerja (lembur) agar proyek rampung sesuai waktu yang ditentukan. "Ya mudah-mudahan bisa terkejar waktunya, sisa waktu sekitar dua minggu lagi harus selesai," kata Adiat di lokasi, Senin (8/8).

Para pekerja nampak masih beraktivitas memasang batu pada dinding penahan tanah. Tembok Penahan Tanah (TPT) akan dibuat dengan bentuk tiga anak tangga. Ketinggian setiap anak tangga mencapai 4 meter. "Jadi nanti dibuat tiga trap, yang

bawah itu yang sudah selesai itu trap pertama, tingginya 4 meter. Sekarang sedang penyelesaian trap kedua," kata Adiat.

Sejak awal April 2022 lalu, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat memulai proses pembangunan TPT Jl Raya Cilebut sepanjang 19,5 meter dari awal pengajuan sepijan kurang lebih 30 meter.

Ironisnya, proyek TPT yang sudah mencapai 90 persen itu justru malah ambrol sebelum rampung, 16 Juni lalu. Pihak SDA Jawa Barat menyebut kejadian itu akibat kondisi alam di lokasi dan bukan akibat kelalaian kontraktor.

Pembangunan pun kembali dilanjutkan berdasarkan kesepakatan. Pihak SDA Jawa Barat bersedia menambah waktu pembangunan selama 50 hari, dengan syarat kontraktor membayar denda sebesar Rp 500 ribu setiap hari selama 50 hari dimulai 2 Juli 2022. ● **gio**

Proyek Rusunami Bakal Dibangun di Cisaranten Kota Bandung

BANDUNG (IM)-Hunian rumah susun sederhana milik (Rusunami) bakal dibangun di wilayah Cisaranten Kota Bandung. Pembangunan di lahan milik Kementerian PUPR itu akan mulai April 2023.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, untuk itu pihaknya membahas bersama Kementerian PUPR sebagai pemilik lahan pembangunan Rusunami di Cisaranten Kota Bandung.

"Alhamdulillah dalam waktu dekat ini, hal teknis pembangunan Rusunami di Cisaranten Kota Bandung akan dibicarakan. Relatif enggak ada hambatan. Kalau rencana ini lancar, kita harapkan di Maret atau April 2023 groundbreakingnya bisa dilakukan," kata Yana Mulyana, Senin (8/8).

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bektio Martoyoedo mengatakan, pembangunan Rusunami di Cisaranten Kota Bandung seluas 3,2 hektare akan mulai dibangun April 2023 itu memiliki kapasitas hunian sebanyak 1.900 unit.

"Target tahun 2029 sudah semua terisi. Tahap pertama tahun 2025 terisi dengan pembangunan dua tahun," kata Haryo Bektio Martoyoedo.

Dia menyebutkan, Rusunami di Cisaranten Kota Bandung itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Masyarakat yang dapat memanfaatkan rusunami maksimal berpenghasilan Rp4 juta ke bawah. ● **pur**

Ada P3K dan Pilkada, Beban APBD Cianjur Cukup Berat

CIANJUR (IM)- Beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, relatif cukup berat. Selain harus menanggung gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), beban APBD juga harus membiayai penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

Bupati Cianjur, Herman Suherman, tak memungkiri tahun ini beban anggaran daerah cukup direpotkan. P3K, penggantian P3K berdasarkan amanat undang-undang menjadi beban daerah. "Sekarang DAU (dana alokasi khusus) sendiri report dengan adanya P3K. Belum lagi dana cadangan untuk Pemilu 2024. Keuangan daerah sangat direpotkan," terang Herman ditemui di halaman Pendopo Cianjur, beberapa waktu lalu.

Herman menuturkan tahun ini tadinya akan menjadi sebuah harapan bangkitnya kembali perekonomian dan pembangunan setelah dihantam pandemi covid-19 hampir 2 tahun. Terutama pembangunan infrastruktur jalan yang notabene kurun 2 tahun terakhir tak bisa berjalan maksimal lantaran anggarannya digunakan refocusing penanganan pandemi covid-19.

"Makanya, untuk penangan infrastruktur jalan, kami

sedang menjajaki kemungkinan meminjam dari pihak perbankan," sebut Herman. Plafon dana pinjaman ke pihak perbankan kisaran Rp200 miliar. Saat ini, kata Herman, rencana dana pinjaman sedang tahap pembahasan di DPRD.

"Saya sudah ngobrol dengan pimpinan DPRD. Kita sudah dua tahun tidak melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan. Kita tahu ini karena covid-19. Di sisi lain kita punya target penuntasan infrastruktur jalan," tuturnya.

Rencana dana pinjaman itu sebagai bentuk jawaban kepada masyarakat yang selama ini menuntut kondisi jalan yang mantap. Herman meyakini tak semua masyarakat paham dan tahu kondisi keuangan daerah ketika diterpa pandemi covid-19. "Masyarakat mungkin tidak tahu. Kami di Pemkab Cianjur berinisiatif untuk menuntaskan masalah infrastruktur jalan mau pinjaman dana ke perbankan. Itu dalam rangka mengejar infrastruktur," imbuhnya.

Untuk skema pembayarannya, sebut Herman, Pemkab Cianjur tidak akan memaknai DAU karena saat ini akan dialokasikan juga membayar gaji P3K. Pembayaran cicilan ke pihak perbankan akan dialokasikan dari

pendapatan asli daerah (PAD).

"Jangka waktu pembayaran dana pinjaman direncanakan selama lima tahun. Bahkan kalau PAD meningkat terus, saya ingin pembayaran cicilannya, selesai. Tapi kita semakam pembayarannya selama lima tahun," tegasnya.

Herman yakin PAD Kabupaten Cianjur bisa terus meningkat. Keyakinan itu tak terlepas pengalaman selama pandemi covid-19, PAD Kabupaten Cianjur satu-satunya pemerintah daerah di Jawa Barat yang bisa tercapai 100%.

"Peluang potensinya masih banyak yang perlu digali. Itu juga atas saran dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kita akan tindak lanjut," pungkasnya.

Target PAD Kabupaten Cianjur tahun ini sebesar Rp1.059.443.482.736. Potensinya berasal dari pajak daerah sebesar Rp267.248.060.043, dari retribusi daerah sebesar Rp52.611.191.385, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp25.152.779.924, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp714.431.451.384. ● **pur**



IDN/ANTARA

MURAL KRITIK SOSIAL

Warga melintas di samping mural bertemakan kritik sosial di Cikaret, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (8/8). Mural tersebut merupakan wujud ekspresi dari sejumlah seniman serta sebagai media penyampaian kritik sosial kepada pemerintah.

DPRD Tepis Rumor Pertarungan Panas Tahta Sekda Kabupaten Cirebon

CIREBON (IM)- Terkait adanya rumor pertarungan panas tahta Sekda Kabupaten Cirebon, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan menepisnya. Menurutnya, di kelembagaan DPRD setempat rumor pertarungan panas itu terjadi secara terbuka antara Bupati Cirebon, Imron dan Wakil Bupati, Wahyu Tjiptaningsih. Dalam proses open bidding Sekda Kabupaten Cirebon itu, Imron terkesan diam dan sudah punya jago sendiri. Hal itu wajar karena penentuan Sekda itu merupakan hak prerogatif bupati.

Sofwan menegaskan, sebetulnya DPRD dan para pejabat eselon II tidak perlu khawatir dengan keberadaan isu putra mahkota. Pasalnya, proses seleksi Sekda Kabupaten Cirebon itu bersifat terbuka. Artinya, siapapun berhak ketika sudah memenuhi syarat. "Kenapa seleksi terbuka Sekda sepi pendaftar. Kenapa hanya ada empat nama. Padahal, Sekda itu merupakan puncak jabatan bagi eselon II. Harusnya jangan sampai sepi peminat," kata Sofwan, Senin (8/8).

Justru akunya, yang awal-awal mendaftar malah pejabat pejabat yang terbelang baru di Kabupaten Cirebon. Namun, dia menilai banyak juga kemungkinan lain. Bisa jadi, karena selama ini Sekda perannya kurang. Atau, adanya deal politik mendekati hajat Pilkada yang dianggap menjadi beban kedepan.

"Sehingga banyak dari eselon II yang telah lama berkprah tidak mau mendaftar. Saya tidak paham

alasan sepi peminat calon Sekda. Padahal kenapa eselon II tidak pada mendaftar," jelasnya.

Namun, dari data yang diperoleh menyebutkan, dua nama baru yaitu Hilmy Rivai dan Deni Nurcahya, perolehan nilainya bertolak belakang. Dari hasil nilai rekam jejak, Iwan Ridwan yang juga Kadis L.H memperoleh nilai 4.555. Lalu, Hilmi Rivai yang sekarang menjabat sebagai Asisten Perekonomian mendapatkan nilai 4.553. Iyan Edhyana yang menjabat sebagai Inspektur daerah memperoleh nilai 4.461. Sedangkan Deni Nurcahya harus puas di urutan ke empat dengan nilai 4.175.

Sementara hasil test Kompetensi dan Psikologi, Hilmy memperoleh nilai yang hampir sempurna dari nilai sempurna yaitu 5.000. Dia memperoleh nilai 4.997, disusul Iwan 4.898 dan Iyan memperoleh nilai 4.803. Sementara Deni kembali pada urutan buncit dengan nilai 4.281. Tercatat, nilai ini adalah nilai yang paling objektif karena by system.

Sedangkan untuk penilaian makalah, Iyan pada urutan atas dengan nilai 4.260, disusul Hilmy dengan nilai 4.220, iwan dengan nilai 3,960. Bila dikalkulasikan, Hilmy nvai memperoleh nilai paling tinggi dengan nilai 13.750. Disusul Iyan dengan nilai 13.524 dan Iwan dengan nilai 13.474. Alhasil, dari akumulasi nilai rekam jejak, kompetensi dan psikologi serta nilai untuk penilaian makalah, Deni Nurcahya sudah tidak masuk kategori tiga besar. ● **pur**



IDN/ANTARA

BANDUNG LAUTAN KEBAYA

Warga melakukan pawai menggunakan kebaya saat aksi Srikandi Bandung Lautan Kebaya di Bandung Zoological Garden, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/8). Aksi tersebut bertujuan untuk kampanye, pelestarian serta dukungan agar kebaya Indonesia ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang berasal dari Indonesia.